

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amanulloh, Naeni, 2015, *Demokratisasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Bushar, Muhammad, 1978, *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Cahyono, Heru, 2006, *Dinamika Demokratisasi Desa di Beberapa Daerah di Indonesia Pasca 1999*, LIPI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Konflik Elite Politik di Pedesaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dahl, Robert A., 2001, *Perihal Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Filsafat Fragmentaris*, Kanisius, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*, Setara Press, Malang.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1984, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kusnardi dan Saragih, Moh Bintang R., 1988, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mahfud, Moh., 1999, *Hukum Dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Mardimin, J., 2002, *Perubahan Sosial Politik di Desa*, Widya Sari Press, Semarang.
- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan pertama, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
- Mulyana, 2005, *Demokrasi Dalam Budaya Lokal*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Nasila, Jans Wilianto, 2014, *Rekonstruksi Kepemimpinan Sosial Pada Aras Kearifan Lokal Desa*, CV Independent Generation, Yogyakarta.
- Nasroen, Muhammad, 1955, *Daerah Otonomi Tingkat Terbawah*, Beringin Traiding Company, Jakarta.
- Nurtjahjo, Hendra, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Saefulloh Fatah, Eep, 1994, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Ghalia, Jakarta.
- Soenardjo, R.H. Unang, 1984, *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan: Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Suharsimi, Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suryaningrat, Bayu, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No.5/1979: Penyelenggaraan Pemerintahannya*, Youngmafh, Jakarta.
- Swasono, Sri Edi (penyunting), 2002, *Satu Abad Bung Hatta (Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan)*, UI Press, Jakarta.
- Syafrudin, Ateng, 1991, *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Tjiptoherijanto, Prijono dan M. Prijono, Yumiko, 1983, *Demokrasi di Pedesaan Jawa*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Tim Penyusun, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Widjaja, H.A.W., 1999, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

## B. Hasil Penelitian

Dhermawan, S. Dhandi 2013, “Hubungan Kerja Antara Pemerintahan Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku di Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Magister Hukum FH UGM, Yogyakarta.

Kanisius, Olla Mangu, 2014, “Implementasi Otonomi Luas Daerah Kabupaten Terhadap Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Desa”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum FH UGM, Yogyakarta.

## C. Makalah

Hardiman, F. Budi, 2010, “Etika Politik Habermas”, *Makalah*, Salihara, Jakarta.

## D. Internet

Eko, Sutoro, “Demokrasi Desa”, *web.iaincirebon.ac.id/ebook*, diakses pada 14 Juni 2016.

Gayatri, Irine H., “Demokrasi Lokal di Desa: *Quo Vadis?*”, [http://interseksi.org/archive/publications/essays/articles/demokrasi\\_lokal\\_quo\\_vadis.html](http://interseksi.org/archive/publications/essays/articles/demokrasi_lokal_quo_vadis.html), diakses pada 15 November 2014.

Hida, Taura, “Musyawarah Desa: Demokrasi Deliberatif dan Ruang Publik”, <https://adiyadhriyadh.wordpress.com/2015/02/05/musyawah-desa-demokrasi-deliberatif-dan-ruang-publik/>, diakses pada 15 Juni 2016.

Sujito, Arie, “Pemilu Culas, Demokrasi Bablas”, <https://ariesujito.wordpress.com/category/makalah>, diakses pada 18 November 2014.

Yuli, “Kabupaten Tana Tidung Kabupaten Termuda di Kalimantan”, <http://www.vivaborneo.com/kabupaten-tana-tidung-kabupaten-termuda-di-kaltim.htm>, diakses pada 24 Desember 2014.

## D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979, Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153).

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44370).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 Nomor 9).